

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

|                   |   |
|-------------------|---|
| Berita            | : Kepala Sekolah Harus Selesaikan Laporan BOS |
| Entitas / Cakupan | : Kabupaten Bandung Barat                     |
| Sumber / Hal      | : Pikiran Rakyat/Hal.17                       |
| Edisi             | : Sabtu, 31 April 2018                        |

## Kepala Sekolah Harus Selesaikan Laporan BOS

NGAMPRAH, (PR).-

Para kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat dituntut agar bisa menyelesaikan laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang kini mengikuti sistem laporan keuangan daerah. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat melakukan pembinaan terhadap semua kepala sekolah agar laporan dana BOS bisa dipertanggungjawabkan.

Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Jalaludin mengungkapkan, peraturan penggunaan dana BOS mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,

Pelaksanaan, Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana BOS. "Peraturan ini sudah berlaku sejak tahun lalu. Dalam peraturan ini, mekanisme pelaporan seperti dalam laporan keuangan daerah," ujarnya, Selasa (27/3/2018).

Dia menuturkan, dana BOS dari pemerintah pusat itu disalurkan langsung ke rekening sekolah. Tahun ini, dana BOS yang disalurkan mencapai Rp 161 miliar untuk 672 SD dan 67 SMP negeri di Kabupaten Bandung Barat. Dana tersebut untuk kebutuhan operasional sekolah yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pada Senin (26/3/2018), Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat melakukan pembinaan kepada semua kepala sekolah dan bendahara untuk menjelaskan mengenai pelaporan dana BOS ini. "Jangan sampai kepala sekolah bingung bagaimana membuat laporannya. Apalagi, sampai mengganggu perhatian mereka dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah," tuturnya.

Jalaludin mengakui, sistem pelaporan dana BOS kali ini lebih rumit, sehingga para kepala sekolah, bendahara, dan operator perlu melakukan penyesuaian. Namun, menurut dia, hal ini tidak boleh membuat mereka merasa khawatir dalam menyelesaikan laporan karena pihaknya terus melakukan pendampingan.

"Adanya aturan baru ini justru untuk membuat penggunaan dana BOS lebih akuntabel. Jadi harapannya, dana ini bisa digunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah," ujarnya seraya menambahkan, adanya sistem baru mengenai pelaporan penggunaan dana BOS ini juga diharapkan agar hal ini tidak lagi menjadi temuan BA dan Pemeriksaan Keuangan seperti pada tahun lalu. **(Cecep Wijaya)\*\*\***

”  
*Adanya aturan baru ini justru untuk membuat penggunaan dana BOS lebih akuntabel. Jadi harapannya, dana ini bisa digunakan seoptimal mungkin.*  
”